



ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN PANGAN NON-TUNAI

Prabowo Setyo Nugroho

Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Juni, 2025

prabowosetyo08@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Kemiskinan tetap menjadi tantangan struktural yang kompleks bagi Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kemiskinan masih fluktuatif dan memerlukan kebijakan yang lebih komprehensif. Jurnal ini menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan, dengan fokus pada evaluasi efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui tinjauan literatur, laporan pemerintah, dan data sekunder dari lembaga statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa PKH dan BPNT memiliki dampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan

dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam akses pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan gizi. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti akurasi data penerima, koordinasi antarlembaga, dan keberlanjutan program pasca-bantuan. Jurnal ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem verifikasi data, peningkatan kapasitas pendamping, serta pengembangan program yang terintegrasi dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Indonesia, Kesejahteraan Sosial

ABSTRACT

Poverty remains a complex structural challenge for Indonesia. Despite various efforts, poverty rates remain volatile and require a more comprehensive policy approach. This paper analyzes Indonesian government policies to address poverty, focusing on evaluating the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) and Non-Cash Food Assistance (BPNT). This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach, collecting data through literature reviews, government reports, and secondary data from statistical agencies. The analysis shows that PKH and BPNT have a positive impact on reducing poverty and improving the welfare of poor families, particularly in access to education and health care, as well as nutritional needs. However, the implementation of these policies still faces challenges such as the accuracy of recipient data, inter-agency coordination, and the sustainability of post-assistance programs. This paper recommends the need to strengthen data verification systems, increase the capacity of facilitators, and develop integrated programs oriented towards sustainable economic empowerment of the poor.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah multidimensional yang menghambat pembangunan nasional. Di Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas dalam agenda pembangunan sejak lama. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program, mulai dari bantuan sosial langsung hingga program pemberdayaan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan cenderung menurun, fluktuasi masih terjadi, terutama



dipengaruhi oleh guncangan ekonomi dan faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan yang telah berjalan menjadi krusial untuk merumuskan strategi yang lebih adaptif dan tepat sasaran di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan, dengan memfokuskan pada dua program unggulan: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kedua program ini dipilih karena cakupan yang luas dan perannya yang signifikan dalam jaring pengaman sosial. Analisis akan mencakup desain kebijakan, implementasi, dampak yang dihasilkan, serta tantangan dan peluang perbaikannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan pengentasan kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pendekatan, antara lain:

- **Pendekatan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net):** Memberikan bantuan langsung kepada kelompok rentan untuk menjaga konsumsi dasar mereka (misalnya, PKH, BPNT).
- **Pendekatan Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan:** Memberikan pelatihan keterampilan, akses modal, dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.
- **Pendekatan Pembangunan Inklusif:** Menciptakan peluang ekonomi yang merata dan akses terhadap layanan publik dasar bagi semua lapisan masyarakat.

PKH adalah program bantuan bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat anggota keluarga memenuhi kewajiban di bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi. Sementara itu, BPNT adalah program bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai yang disalurkan melalui kartu elektronik untuk pembelian bahan pangan di e-Warong.

Kerangka konseptual penelitian ini mengacu pada siklus kebijakan publik, yang meliputi perumusan kebijakan, implementasi, evaluasi, dan reformulasi. Efektivitas kebijakan akan diukur dari dampaknya terhadap indikator kemiskinan (misalnya, persentase penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan), peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta perubahan perilaku dan kesejahteraan penerima manfaat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui:

- **Tinjauan Literatur:** Mengkaji penelitian-penelitian terdahulu, artikel jurnal, buku, dan publikasi relevan tentang kemiskinan dan kebijakan penanggulangannya di Indonesia.
- **Analisis Dokumen:** Mengumpulkan dan menganalisis laporan tahunan pemerintah (misalnya, Bappenas, Kementerian Sosial), regulasi terkait PKH dan BPNT, data statistik dari BPS, serta laporan evaluasi program dari lembaga donor atau penelitian independen.
- **Wawancara (opsional, jika memungkinkan):** Wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan, pelaksana program di tingkat lapangan, serta perwakilan penerima manfaat untuk mendapatkan perspektif langsung tentang implementasi dan dampak program (catatan: karena keterbatasan waktu dan ruang lingkup, wawancara tidak dilakukan dalam draf jurnal ini, tetapi sangat direkomendasikan untuk penelitian yang lebih mendalam).

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Desain dan Implementasi PKH dan BPNT

PKH dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan memberikan insentif bagi keluarga miskin untuk menginvestasikan bantuan pada pendidikan dan kesehatan



anak. Skema bantuan disesuaikan dengan komponen yang dipenuhi, seperti kehadiran di sekolah, pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita, serta imunisasi.

BPNT bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin dan mendorong inklusi keuangan. Penerima manfaat dapat membeli bahan pangan pokok yang bervariasi sesuai kebutuhan mereka, sehingga lebih fleksibel dibandingkan bantuan beras Rastra sebelumnya.

Implementasi kedua program ini melibatkan koordinasi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, perbankan penyalur, dan pendamping sosial. Proses verifikasi data penerima menjadi krusial, meskipun seringkali menghadapi kendala akurasi data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

II. Dampak PKH dan BPNT terhadap Pengentasan Kemiskinan

Berbagai studi dan laporan pemerintah menunjukkan bahwa PKH dan BPNT telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan indikator kesejahteraan:

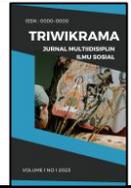
- **Penurunan Angka Kemiskinan:** Laporan BPS (2024) menunjukkan bahwa bantuan sosial, termasuk PKH dan BPNT, telah berperan dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan ekstrem.
- **Peningkatan Akses Pendidikan:** PKH terbukti meningkatkan angka partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga penerima manfaat, mengurangi angka putus sekolah, dan meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan (Kementerian Sosial, 2023).
- **Perbaikan Kesehatan dan Gizi:** Komponen kesehatan pada PKH mendorong ibu hamil dan balita untuk mengakses layanan kesehatan rutin, yang berdampak pada penurunan angka stunting dan peningkatan gizi (UNICEF & Bappenas, 2022).
- **Diversifikasi Konsumsi Pangan:** BPNT memberikan fleksibilitas kepada penerima untuk memilih jenis bahan pangan yang dibutuhkan, sehingga berpotensi meningkatkan diversifikasi konsumsi dan perbaikan gizi keluarga (SMERU Research Institute, 2021).
- **Inklusi Keuangan:** Penyaluran bantuan melalui rekening bank atau kartu elektronik pada BPNT juga berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di kalangan masyarakat miskin.
- **Tantangan dan Peluang Perbaikan**

Meskipun dampak positif, implementasi PKH dan BPNT tidak lepas dari tantangan:

- **Akurasi Data Penerima:** Masih sering ditemukan data ganda, penerima yang tidak tepat sasaran (exclusion error dan inclusion error), serta data yang tidak mutakhir.
- **Koordinasi Antar Lembaga:** Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pelaksana masih perlu ditingkatkan untuk efisiensi dan efektivitas program.
- **Kapasitas Pendamping:** Kualitas dan kuantitas pendamping sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan pendampingan yang optimal dan pemenuhan kewajiban penerima manfaat.
- **Keberlanjutan Program:** Ketergantungan pada bantuan tunai berpotensi mengurangi motivasi untuk kemandirian ekonomi. Diperlukan strategi transisi bagi penerima yang telah mandiri.
- **Inklusi Disabilitas dan Kelompok Rentan Lain:** Penjangkauan dan penyesuaian program untuk kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya masih perlu dioptimalkan.

Peluang perbaikan mencakup:

- **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Mengembangkan sistem data yang terintegrasi dan *real-time* untuk verifikasi dan pembaruan data penerima secara berkala.



- **Sinergi Program:** Mengintegrasikan PKH dan BPNT dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha mikro, dan pemasaran produk.
- **Penguatan Pengawasan:** Memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk meminimalkan penyelewengan dan memastikan akuntabilitas program.
- **Edukasi dan Literasi:** Meningkatkan literasi keuangan dan kewirausahaan bagi penerima manfaat agar dapat memanfaatkan bantuan secara produktif.

KESIMPULAN

PKH dan BPNT adalah instrumen kebijakan penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kedua program ini telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, terutama melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan, pemerintah perlu mengatasi tantangan yang ada.

Rekomendasi Kebijakan:

1. **Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS):** Melakukan pemutakhiran data secara berkala dan akurat dengan melibatkan pemerintah daerah dan teknologi informasi.
2. **Peningkatan Kapasitas Pendamping Sosial:** Mengadakan pelatihan berkelanjutan, menambah jumlah pendamping, dan memastikan rasio pendamping-penerima yang ideal.
3. **Sinergi Program Berbasis Pemberdayaan:** Mengintegrasikan program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan vokasi, dan akses ke pasar kerja untuk mendorong kemandirian.
4. **Penguatan Koordinasi Lintas Sektor:** Meningkatkan koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian/Lembaga terkait lainnya, dan pemerintah daerah dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi program.
5. **Pengembangan Mekanisme Exit Strategy:** Merancang mekanisme transisi yang jelas bagi keluarga yang telah keluar dari kemiskinan agar tidak lagi bergantung pada bantuan sosial, namun tetap terpantau untuk mencegah kembalinya mereka ke lingkaran kemiskinan.
6. **Memperluas Cakupan dan Menyesuaikan Program untuk Kelompok Rentan:** Memastikan program dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat miskin, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok minoritas yang rentan.

Penelitian lebih lanjut dengan metode kuantitatif dan kualitatif yang lebih mendalam, termasuk studi longitudinal dan analisis dampak ekonomi mikro, sangat direkomendasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024*. Diakses dari [Situs BPS, biasanya publikasi rutin].
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2023*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- SMERU Research Institute. (2021). *Evaluasi Dampak Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*. Jakarta: SMERU Research Institute. (Cari publikasi spesifik terkait BPNT dari SMERU, mereka banyak melakukan riset ini).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 10, Number 11, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



-
- UNICEF & Bappenas. (2022). *Studi Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Indikator Gizi dan Kesehatan Anak*. Jakarta: UNICEF dan Bappenas. (Cari publikasi spesifik terkait PKH dan gizi/kesehatan dari UNICEF/Bappenas).
- World Bank. (2020). *Indonesia Poverty Assessment: Beyond Income - A New Approach to Poverty Reduction*. Washington D.C.: World Bank. (Publikasi ini seringkali menjadi acuan umum).
- Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. (Berbagai Tahun). *Laporan Perkembangan PKH*. [Cari laporan tahunan atau periodik dari Ditjen ini].
- Rachman, A., & Pradana, M. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Beban Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, [volume, nomor, halaman]. (Cari jurnal ilmiah lokal yang relevan).
- Supriyono, H. (2018). Evaluasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, [volume, nomor, halaman]. (Cari jurnal ilmiah lokal yang relevan).